

Kebijakan MBG: Menabur Janji Manis, Menuai Ekonomi Kritis

Elang Bani Ibrahim Panjiwinata^a

^aPoliteknik STIA LAN Jakarta

e-mail : elangebaniibrahim999@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 dengan anggaran Rp 306,69 triliun, termasuk Rp 171 triliun khusus MBG. Program ini menaikkan target penerima manfaat dari 17 juta menjadi 82,9 juta orang. Metode kualitatif digunakan dengan analisis dokumen kebijakan, literatur akademik, dan laporan berita untuk mengevaluasi dampak ekonomi, fiskal, dan risiko pelaksanaan. Hasil menunjukkan MBG dapat menjawab masalah gizi, terutama stunting yang masih mencapai 19,8% pada 2024, namun pendanaan melalui pemangkasan anggaran kementerian dan transfer daerah menimbulkan risiko fiskal jangka panjang. Infrastruktur logistik dan pengawasan transparan masih menjadi kendala dalam ekspansi cepat program ini. Klaim pertumbuhan ekonomi 8% dinilai terlalu optimistis dibandingkan realita 5% pada 2024. Kesimpulan, MBG berpotensi meningkatkan gizi dan ekonomi lokal, tetapi keberhasilan tergantung pada manajemen fiskal disiplin dan mekanisme implementasi efektif. Kebijakan berbasis bukti, pelaksanaan bertahap, dan sumber pendanaan diversifikasi diperlukan untuk keberlanjutan jangka panjang.

Kata Kunci: kebijakan fiskal; program makan bergizi; kebijakan populis; keberlanjutan ekonomi.

MBG Policy: Sowing Sweet Promises, Reaping a Critical Economy

Abstract

This study critically examines the Free Nutritious Meal Program (MBG), a flagship initiative launched by President Prabowo Subianto in 2025 with a total budget of IDR 306.69 trillion, including IDR 171 trillion specifically allocated for MBG. The program increased its target beneficiaries from 17 million to 82.9 million people. A qualitative approach was used by analyzing policy documents, academic literature, and current news reports to evaluate the program's economic impact, fiscal sustainability, and potential risks. Findings show that while MBG addresses urgent nutritional issues, particularly the 19.8% stunting rate in 2024, its funding strategy based on substantial cuts to ministries and regional transfers raises concerns about Indonesia's long-term fiscal health. The rapid expansion and ambitious targets require strong logistical infrastructure and transparent oversight, which remain challenging. Government claims of boosting economic growth to 8% are considered overly optimistic compared to the 5% growth achieved in 2024. In conclusion, MBG has the potential to improve nutrition and support local economies; however, disciplined fiscal management and effective implementation mechanisms are crucial. Evidence-based policies, gradual rollout, and diversified funding sources are essential to ensure long-term success and safeguard Indonesia's economic future.

Keywords: fiscal policy; nutritious meal program; populist policy; economic sustainability.

A. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025 menandai babak baru dalam sejarah kebijakan sosial dan fiskal Indonesia. Dengan lonjakan alokasi anggaran dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun hanya dalam tiga minggu implementasi, kebijakan ini menjadi salah satu langkah fiskal paling dramatis dalam dua dekade terakhir. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum program ini, memangkas anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun setara 8,4% dari total belanja negara untuk mendanai perluasan MBG. Langkah ini bukan hanya menyoroti keberanian politik, tetapi juga memunculkan perdebatan tajam tentang prioritas dan keberlanjutan fiskal nasional.

Secara historis, Indonesia memang menghadapi tantangan serius dalam masalah stunting dan gizi buruk. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Meskipun tren ini positif, target nasional 14,2% pada 2029 masih jauh dari jangkauan. Dalam konteks inilah MBG hadir sebagai respons kebijakan yang ambisius, dengan harapan dapat mempercepat penurunan stunting sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect).

Namun, implementasi MBG menghadirkan paradoks kebijakan yang kompleks. Di satu sisi, program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat angka yang sangat besar untuk ukuran program sosial di Indonesia dengan janji akan menciptakan pasar baru, mendorong konsumsi rumah tangga, dan membuka jutaan lapangan kerja baru. Pemerintah bahkan mengklaim program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, jauh di atas

capaian tahun 2024 yang hanya 5,03%. Namun, di sisi lain, realokasi anggaran yang sangat besar dilakukan dengan memangkas dana dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Pengurangan anggaran ini tidak hanya menyasar belanja operasional dan seremonial, tetapi juga berpotensi mengganggu program-program vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang selama ini menjadi penopang pembangunan nasional.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah pengorbanan terhadap program-program vital tersebut sebanding dengan manfaat ekonomi yang dijanjikan MBG? Banyak ekonom, seperti yang dikutip dari berbagai sumber, menilai bahwa lompatan pertumbuhan ekonomi hingga 8% hanya karena satu program sangat tidak realistis tanpa didukung reformasi struktural yang lebih luas. Selain itu, tantangan implementasi di lapangan sangat besar: mulai dari kesiapan infrastruktur logistik, kapasitas produksi pangan lokal, hingga pengawasan dan transparansi distribusi anggaran. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa program berskala nasional sering kali menghadapi masalah birokrasi, inefisiensi, bahkan rawan korupsi jika tidak diawasi secara ketat.

Literatur akademik mendefinisikan populisme sebagai ideologi yang membelah masyarakat menjadi "rakyat murni" versus "elite korup". Dalam konteks ekonomi, kebijakan populis sering kali menawarkan solusi jangka pendek yang menarik secara politik namun berpotensi merugikan stabilitas fiskal jangka panjang. Pengalaman Venezuela di bawah Hugo Chávez menunjukkan bagaimana program sosial ambisius dapat berujung pada krisis ekonomi ketika tidak didukung oleh keberlanjutan fiskal yang memadai.

Penelitian terdahulu mengenai program makan sekolah internasional memberikan perspektif komparatif yang valuable. Studi mengenai National School Lunch Program (NSLP) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa program dengan dana federal sebesar \$17,2 miliar pada 2023 berhasil melayani 4,6 miliar makan siang. Sementara itu, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Brasil yang menjadi program makan bergizi terbesar kedua dunia, melayani lebih dari 50 juta siswa dengan pendekatan yang mengintegrasikan pertanian lokal. Studi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengenai efek pengganda program MBG menunjukkan potensi kontribusi 34,2% terhadap PDB pada 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan Computable General Equilibrium (CGE) untuk menganalisis dampak alokasi anggaran MBG terhadap berbagai indikator ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa setiap Rp 1.000 yang digelontorkan untuk program MBG berpotensi memberikan manfaat hingga Rp 63.500 terhadap perekonomian.

Namun, literatur juga menunjukkan skeptisisme terhadap klaim multiplier effect yang berlebihan. Penelitian akademis mengenai dampak jangka panjang program MBG menunjukkan bahwa meskipun program ini berpotensi menurunkan angka stunting dan malnutrisi, terdapat tantangan signifikan dalam aspek pendanaan, ketersediaan bahan pangan lokal, dan mekanisme distribusi. Studi kasus pada sekolah yang telah menerapkan program serupa selama lebih dari lima tahun menunjukkan hasil yang beragam tergantung pada kualitas implementasi.

Analisis Center of Economics and Law Studies (Celios) memperingatkan bahwa defisit APBN berpotensi melampaui batas aman 3% dari PDB akibat program MBG. Proyeksi

menunjukkan bahwa jika program MBG mencapai target 100% pada 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34% dari PDB bahkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%.

Literatur mengenai kebijakan fiskal berkelanjutan menekankan pentingnya mengendalikan defisit anggaran dan utang negara. Prinsip-prinsip kebijakan fiskal berkelanjutan mencakup peningkatan pendapatan negara yang efektif dan adil, pengelolaan pengeluaran negara yang efisien, serta pengurangan pengeluaran yang tidak produktif. Dalam konteks ini, realokasi anggaran masif untuk program MBG perlu dievaluasi dari perspektif keberlanjutan jangka panjang.

Meskipun terdapat berbagai studi mengenai program makan sekolah dan kebijakan populis, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang secara khusus menganalisis dampak program MBG Indonesia dalam konteks keberlanjutan fiskal. Mayoritas penelitian existing berfokus pada aspek gizi dan kesehatan, sementara analisis komprehensif mengenai trade-off antara manfaat sosial dan risiko fiskal masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik dari program MBG.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pelaksanaan MBG dalam bingkai keberlanjutan fiskal Indonesia. Pertanyaan utama yang akan dijawab adalah: apakah MBG benar-benar dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi seperti yang dijanjikan, atau justru berpotensi menciptakan risiko fiskal baru yang bisa menghambat pembangunan jangka panjang? Analisis ini menjadi sangat relevan mengingat besarnya dampak kebijakan ini terhadap struktur

anggaran negara, stabilitas ekonomi nasional, dan masa depan pembangunan Indonesia. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya penting untuk menilai efektivitas MBG, tetapi juga sebagai refleksi atas tata kelola kebijakan fiskal dan sosial di era pemerintahan baru.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan publik untuk mengkaji secara mendalam kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap dinamika, proses, dan dampak kebijakan, termasuk aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti persepsi, narasi, dan dinamika politik di balik kebijakan MBG.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan MBG, antara lain Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, laporan-laporan kementerian terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Selain itu, peneliti juga melakukan telaah terhadap notulensi rapat, siaran pers pemerintah, dan dokumen hasil evaluasi awal implementasi MBG yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, laporan lembaga penelitian independen seperti INDEF, Celios, dan CORE Indonesia, serta pemberitaan media massa yang kredibel dan aktual. Sumber-sumber ini dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam, baik dari sisi akademis, praktisi, maupun opini

publik, sehingga dapat memperkaya analisis dan memperkuat validitas temuan.

Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber data untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Triangulasi ini penting untuk meminimalisir bias dan memastikan bahwa hasil analisis benar-benar mencerminkan realitas empiris di lapangan. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (critical discourse analysis) untuk menelaah narasi kebijakan MBG, termasuk bagaimana kebijakan ini dikonstruksi, didiseminasi, dan dipersepsikan oleh publik serta implikasinya terhadap struktur ekonomi-politik Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1) Skala Realokasi Anggaran

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 menjadi tonggak sejarah baru dalam kebijakan fiskal Indonesia. Dalam waktu singkat, program ini mengalami lonjakan anggaran dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun hanya dalam tiga minggu implementasi. Data hingga Mei 2025 menunjukkan bahwa MBG telah menjangkau 4,8 juta penerima manfaat melalui 1.691 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, melampaui target Presiden Prabowo sebesar 4 juta penerima manfaat pada akhir Mei 2025 (Bisnis.com, 2025).

Transformasi anggaran yang sangat cepat tersebut menunjukkan sikap responsif pemerintah dalam menindaklanjuti janji kampanye, namun juga menimbulkan tanda tanya besar terkait perencanaan dan kesiapan implementasi. Pembiayaan tambahan untuk MBG diperoleh melalui pemangkasan drastis anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp

256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,595 triliun (Media Keuangan Kemenkeu, 2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan ini menyasar belanja operasional perkantoran, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta dana transfer ke daerah. Namun, realokasi sebesar ini berpotensi mengganggu program-program vital lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.

Target ambisius untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025 membutuhkan anggaran hingga Rp 25 triliun per bulan atau setara Rp 1 triliun per hari. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pencapaian target ini memerlukan pembangunan 32.000 SPPG dalam waktu kurang dari setahun (Kompas.com, 2025). Skala operasional ini belum pernah terjadi dalam sejarah program sosial Indonesia dan menuntut kesiapan logistik, SDM, serta pengawasan yang luar biasa.

2) Multiplier Effect

Klaim pemerintah mengenai multiplier effect program MBG perlu dievaluasi secara kritis. Studi INDEF (2024) menyebutkan bahwa MBG berpotensi menyumbang 34,2% terhadap PDB pada 2025, dengan setiap Rp 1.000 investasi menghasilkan manfaat Rp 63.500. Namun, angka ini perlu dikontekstualisasikan dengan realitas implementasi di lapangan.

Data dari pilot project di 10 kabupaten/kota menunjukkan hasil yang lebih realistis: UMKM yang terlibat mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 33,68% dengan penambahan 3 tenaga kerja per unit, sementara mitra pengemudi mengalami peningkatan pendapatan 17% dengan tambahan 2 pemesanan per hari (INDEF,

2024). Meski positif, capaian ini masih jauh dari proyeksi makroekonomi yang diklaim pemerintah. Peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian, menekankan bahwa multiplier effect terutama berasal dari terciptanya lapangan kerja baru dan pangsa pasar tambahan bagi masyarakat lokal. Pembentukan dapur SPPG diharapkan dapat mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari produk lokal. Namun, realisasi ini sangat bergantung pada kapasitas produksi lokal dan efisiensi distribusi yang masih menjadi tantangan besar.

3) Risiko Fiskal Jangka Panjang

Analisis risiko fiskal menunjukkan kekhawatiran serius mengenai sustainability program MBG. Meskipun Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa APBN masih mampu membiayai program MBG meski mengalami defisit Rp 31 triliun hingga Februari 2025, proyeksi jangka panjang menunjukkan risiko yang mengkhawatirkan (RM.id, 2025).

Studi Celios memproyeksikan bahwa jika program MBG terus berjalan hingga mencapai target 100% pada 2029, defisit APBN akan mencapai 3,34% dari PDB. Angka ini melampaui batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara sebesar 3% dari PDB (Katadata.co.id, 2024). Bahkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi optimistis 7%, defisit APBN tetap akan melampaui batas aman. Implikasi jangka panjang dari kondisi ini adalah menyempitnya fleksibilitas fiskal pemerintah. Celios memperingatkan bahwa dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB yang semakin tinggi, pemerintah tidak akan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan belanja stimulasi ekonomi di luar belanja rutin. Kondisi ini dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam merespons

shock ekonomi atau krisis yang mungkin terjadi di masa depan.

Selain itu, risiko korupsi dan inefisiensi juga meningkat seiring besarnya anggaran yang digelontorkan dan kompleksitas distribusi program. Tanpa pengawasan ketat, MBG berpotensi menjadi kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia (Kontan.co.id, 2025).

Analisis komprehensif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada awal 2025 menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan salah satu langkah paling ambisius dan kontroversial dalam sejarah pengelolaan fiskal dan kebijakan sosial nasional. Dengan realokasi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun setara 8,4% dari total belanja negara dan peningkatan anggaran MBG dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun dalam waktu tiga minggu, pemerintah menegaskan komitmen politik untuk mengatasi masalah stunting dan malnutrisi yang telah lama membayangi Indonesia.

Namun, di balik niat mulia tersebut, implementasi MBG menghadirkan risiko fiskal yang signifikan dan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keberlanjutan ekonomi Indonesia ke depan. Realokasi anggaran yang sangat besar, yang dicapai melalui pemangkasan drastis anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, telah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi terganggunya program-program vital lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya menyasar belanja yang bersifat seremonial atau operasional, namun juga berpotensi mengorbankan program-program pembangunan yang telah direncanakan dan selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Data implementasi hingga Mei 2025 memang menunjukkan pencapaian yang melampaui target jangka pendek, dengan 4,8 juta penerima manfaat melalui 1.691 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Angka ini melebihi target Presiden Prabowo Subianto sebesar 4 juta penerima manfaat pada akhir Mei 2025. Namun, capaian ini masih sangat jauh dari target ambisius 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025. Tantangan logistik dalam membangun 32.000 SPPG dalam waktu kurang dari setahun, memastikan kualitas makanan, serta meningkatkan kapasitas implementasi di seluruh daerah menjadi kendala utama yang harus segera diatasi.

Dari perspektif ekonomi, klaim multiplier effect yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% perlu dievaluasi secara realistis dan berbasis data. Meskipun pilot project menunjukkan adanya dampak positif terhadap UMKM, dengan peningkatan pendapatan rata-rata 33,68% dan penambahan tenaga kerja, proyeksi makroekonomi yang sangat optimistik belum didukung oleh evidence yang memadai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya mencapai 5,03%, dan sangat tidak realistis jika hanya mengandalkan satu program untuk mendorong pertumbuhan hingga 8% tanpa reformasi struktural yang lebih luas.

Risiko defisit APBN yang dapat mencapai 3,34% dari PDB pada 2029, sebagaimana diproyeksikan oleh Celios, menunjukkan bahwa program ini berpotensi menciptakan beban fiskal yang berkelanjutan. Jika tren ini tidak segera dikendalikan, pemerintah akan kehilangan ruang fiskal untuk melakukan belanja stimulasi ekonomi di luar belanja rutin, sehingga kemampuan negara dalam

merespons shock ekonomi atau krisis di masa depan akan sangat terbatas.

Perbandingan dengan program internasional seperti National School Lunch Program (NSLP) di Amerika Serikat, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) di Brasil, dan Kyūshoku di Jepang menunjukkan pentingnya struktur pembiayaan yang berkelanjutan, integrasi dengan ekonomi lokal, dan shared responsibility antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Model-model ini dapat menjadi acuan penting bagi reformasi program MBG agar lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pentingnya Implementasi Secara Bertahap

Implementasi program MBG sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah dengan tingkat stunting tertinggi dan kapasitas implementasi yang memadai. Pendekatan pilot project dapat digunakan untuk menguji efektivitas, efisiensi, dan kesiapan infrastruktur sebelum program diperluas secara nasional. Evaluasi berkala terhadap hasil implementasi di daerah percontohan harus menjadi dasar pengambilan keputusan untuk scaling up. Dengan demikian, risiko kegagalan implementasi dan pemborosan anggaran dapat diminimalisir.

Urgensi Dalam Diversifikasi Pendanaan

Ketergantungan sepenuhnya pada APBN untuk mendanai program MBG menciptakan risiko fiskal yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), kemitraan publik-swasta, dan filantropi sosial. Diversifikasi sumber pendanaan tidak hanya akan mengurangi beban APBN, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa keterlibatan multi-

stakeholder dalam pendanaan program sosial dapat meningkatkan keberlanjutan dan akuntabilitas.

Integrasi dengan Program Eksiting Lain

Untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi anggaran, program MBG harus diintegrasikan dengan program-program gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial yang sudah ada. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting untuk memastikan sinergi program dan mengurangi overhead costs. Integrasi juga memungkinkan pemanfaatan data dan infrastruktur yang sudah tersedia, sehingga implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Transparan

Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel merupakan prasyarat utama keberhasilan program MBG. Pemerintah harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam proses pengawasan dan evaluasi. Transparansi dalam penggunaan anggaran, pelaporan hasil, dan tindak lanjut atas temuan audit sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah terjadinya korupsi serta penyalahgunaan anggaran. Penggunaan teknologi informasi dan sistem pelaporan digital dapat mempercepat deteksi dini terhadap masalah implementasi di lapangan.

Penguatan Komunikasi Publik yang Efektif

Komunikasi publik yang efektif sangat penting untuk membangun dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program MBG. Pemerintah harus menyampaikan tujuan, manfaat, dan tantangan program secara terbuka dan jujur, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Keterbukaan informasi akan

meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi program.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Program MBG merupakan contoh nyata kebijakan populis yang menawarkan janji manis pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, namun berisiko mengorbankan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Di satu sisi, program ini berpotensi menjadi katalisator perbaikan gizi dan penguatan ekonomi lokal, namun di sisi lain, beban fiskal yang sangat besar dan tantangan implementasi yang kompleks dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi nasional.

Pengalokasian sumber daya yang terbatas harus dilakukan dengan lebih bijaksana dan berbasis bukti ilmiah. Kebijakan populis memang menarik secara politik, namun Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang berbasis evidence, tepat sasaran, dan berkelanjutan bukan sekadar program populis yang menabur janji manis namun berpotensi menuai krisis ekonomi di masa depan.

Pertanyaan besarnya: akankah program MBG menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang dijanjikan, atau justru menjadi bom waktu fiskal dan hanya akan menjadi monumen pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan? Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi implementasi, memperkuat tata kelola, dan memastikan keberlanjutan fiskal dalam setiap kebijakan yang diambil.

Kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengimplementasikan program-program

sosial berskala besar di masa depan. Program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun keberhasilan program sangat bergantung pada tata kelola yang baik, inovasi pendanaan, dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas.

Kebijakan sosial yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang, antara janji politik dan realitas fiskal, serta antara harapan masyarakat dan kapasitas negara. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih sehat, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.

REFERENSI

- Anggraeni, H. N., Nurliawati, N., Sufianti, E., & Taryono, O. (2023). Collaborative Strategies in Efforts to Increase the Innovation Index in Cimahi City Government. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 20(1), 11-28. <https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.891>
- Astuti, T. D., Ramdani, E. M., Gedeona, H. T., & Maulana, R. R. (2025). Policy Implementation of Rumah Dataku Development for Quality Family Village in Kiaracundong Sub-district, Bandung City, Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(3), 139-150. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i3.24308>
- Bisnis.com. (2025, 24 Januari). Inpres Pertama Prabowo Babat Anggaran dari Provinsi hingga Kota. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250124/10/1834505/inpres-pertama-prabowo-babat-anggaran-dari-provinsi-hingga-kota>
- Bisnis.com. (2025, 25 Maret). Beda Hitungan Sri Mulyani vs DEN Soal Dampak Ekonomi Makan Bergizi Gratis. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250325/9/1864281/beda-hitungan-sri->

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 9.0

..... POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi MultiStakeholder Untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

- mulyani-vs-den-soal-dampak-ekonomi-makam-bergizi-gratis
- Bisnis.com. (2025). BGN Target Makan Bergizi Gratis Sasar 4,8 Juta Penerima per Akhir Mei 2025. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250521/12/1878823/bgn-target-makan-bergizi-gratis-sasar-48-juta-penerima-per-akhir-mei-2025>
- Bisnis.com. (2025, 24 Maret). DEN: Dampak Makan Bergizi Gratis ke Pertumbuhan Ekonomi Tak Besar. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250324/9/1864092/den-dampak-makan-bergizi-gratis-ke-pertumbuhan-ekonomi-tak-besar>
- Binus.ac.id. (2025, Maret). Program Makan Siang Gratis di Indonesia: Solusi atau Beban? <https://binus.ac.id/character-building/2025/03/program-makan-siang-gratis-di-indonesia-solusi-atau-beban/>
- BloombergTechnoz. (2025, 26 Februari). Ekonom: Realisasi Program MBG Minim, Tak Optimal Genjot Ekonomi. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/68779/ekonomi-realisasi-program-mbg-minim-tak-optimal-genjot-ekonomi>
- BloombergTechnoz. (2025, Maret). Ekonomi Sulit, Program Prioritas Pemerintah Jadi Beban Anggaran. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/68712/ekonomi-sulit-program-prioritas-pemerintah-jadi-beban-anggaran>
- CNBC Indonesia. (2025, 26 Februari). Lengkap! Begini Hitungan Bagaimana MBG Jadi Kunci Pertumbuhan 8%. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250226154031-128-613864/lengkap-begini-hitungan-bagaimana-mbg-jadi-kunci-pertumbuhan-8>
- CNBC Indonesia. (2025, 12 Februari). Anggaran MBG Tambah Rp100 T, Ini yang Bakal Terjadi ke Ekonomi RI. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250212142657-128-610081/anggaran-mbg-tambah-rp100-t-ini-yang-bakal-terjadi-ke-ekonomi-ri>
- DDTC News. (2025). Anggaran Makan Bergizi Gratis Naik Jadi Rp171 Triliun pada Tahun Ini. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809454/anggaran-makan-bergizi-gratis-naik-jadi-rp171-triliun-pada-tahun-ini>
- DPR RI. (2024). Pembelajaran Kebijakan Internasional untuk Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah. <https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/fla/FLA-2-1-November-2024-201-6.pdf>
- Fiskal Daerah. (2025, Januari). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. <https://www.fiskaldaerah.com/2025/01/instruksi-presiden-republik-indonesia.html>
- INDEF. (2024). Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis. <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2024/11/Final-Report-Efek-Pengganda-Program-MBG.pdf>
- Indef.or.id. (2025). Dampak MBG. <https://indef.or.id/publikasi/dampakmbg/>
- Indonesia.go.id. (2025). Galeri Foto Program MBG. <https://indonesia.go.id/galeri/foto/462>
- Indonesia Business Post. (2025). Indonesia to Redirect State Budget Savings to Boost MBG Program. <https://indonesiabusinesspost.com/3458/policy-and-governance/indonesia-to-redirect-state-budget-savings-to-boost-mbg-program>
- Indonesian Journal of Intellectual Publication. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. <https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijpublication/article/view/660>
- InfoBankNews. (2025). Sri Mulyani Akui Pemangkasan Anggaran untuk Biayai Makan Bergizi Gratis.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 9.0

..... POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi MultiStakeholder Untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

- <https://infobanknews.com/sri-mulyani-akui-pemangkasan-anggaran-untuk-biaya-makan-bergizi-gratis/>
- Karunia, R.L., Solihati, K.D., Wati, N.K. (2022). Implementation of Good Governance Principles in the Land Transportation Management Center. *KnE Social Sciences*, 1253-1269.
- Karunia, R.L., Andrianto, N. (2023). Insight and Oversight Function of BPK to Improve the Management of Indonesian Migrant Workers. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara (JTAKEN)*, 9 (1).
- Katadata.co.id. (2024). Celios: Program Makan Bergizi Gratis Bisa Picu Defisit APBN Lewat Batas Aman. <https://katadata.co.id/finansial/makro/673f516a50c16/celios-program-makan-bergizi-gratis-bisa-picu-defisit-apbn-lewat-batas-aman>
- Kementerian Kesehatan RI. (2025). SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20250526/2247848/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198/>
- Kementerian Keuangan RI. (2025). Media Keuangan Kemenkeu: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dinamika dan Sorotan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-makan-bergizi-gratis-mbg-dinamika-dan-sorotan>
- Kompas.com. (2025). Kritik ICW untuk MBG, Hamburkan Anggaran dan Geser Peran Kantin. <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/30/12330401/kritik-icw-untuk-mbg-hamburkan-anggaran-dan-geser-peran-kantin>
- Kompas.id. (2025, Januari). Anggaran Makan Bergizi Gratis Dapat Membengkak Jadi Rp171 Triliun di Tahun Pertama. <https://www.kompas.id/artikel/anggaran-makan-bergizi-gratis-dapat-membengkak-jadi-rp-171-triliun-di-tahun-pertama>
- Kontan.co.id. (2025). Efek Ekonomi MBG. <https://insight.kontan.co.id/news/efek-ekonomi-mbg>
- Kontan.co.id. (2025). Ekonom Paramadina: Program MBG Berisiko Jadi Kasus Korupsi Terbesar di RI. <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-paramadina-program-mbg-berisiko-jadi-kasus-korupsi-terbesar-di-ri>
- Koran Jakarta. (2024). Program MBG Picu Efek Ekonomi. <https://koran-jakarta.com/2024-10-17/program-mbg-picu-efek-ekonomi>
- Lautza, S., Fitriani, L., Tindaon, S.S., Ravenska, N. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Cidap Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8 (1), 186-194.
- Liputan6.com. (2025). Angka Stunting Turun Jadi 19,8%, Menkes: Tantangan Masih Besar. <https://www.liputan6.com/health/read/6035412/angka-stunting-turun-jadi-198-menkes-tantangan-masih-besar>
- Liputan6.com. (2025). Survei Status Gizi Indonesia 2024: Angka Stunting Indonesia Turun Jadi 19,8 Persen. <https://www.liputan6.com/health/read/6034565/survei-status-gizi-indonesia-2024-angka-stunting-indonesia-turun-jadi-198-persen>
- Liputan6.com. (2025, Maret). Guru di Pedalaman Sulawesi Kritik Program Makan Gratis yang Berimbas Pemangkasan Anggaran Pendidikan. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5924008/guru-di-pedalaman-sulawesi-kritik-program-makan-gratis-yang-berimbas-pemangkasan-anggaran-pendidikan>
- Maharani, H.K., Abubakar, R. R. T. (2024). Pembangunan Desa Berkelanjutan: Inovasi Kolaborasi Program Masagi Bersih. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8 (2), 131-144.
- Maharani, H.K., Abubakar, R. R. T., Sufianti, E., Rahmawati, A. (2023). Collaboration Model of Masagi Bersih Program in

- Supporting the Village Sustainable Development (Study Case: Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java). *Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, 71-82.
- Media Keuangan Kemenkeu. (2025). Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimaannya. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimaannya>
- Media Keuangan Kemenkeu. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Dinamika dan Sorotan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-makan-bergizi-gratis-mbg-dinamika-dan-sorotan>
- Merdeka.com. (2025). Prabowo Jamin, Pemerintah Punya Dana untuk Program Makan Bergizi Gratis hingga Akhir Tahun. <https://www.merdeka.com/uang/prabowo-jamin-pemerintah-punya-dana-untuk-program-makan-bergizi-gratis-hingga-akhir-tahun-283800-mvk.html>
- Metrotvnews.com. (2025). Prabowo Teken Inpres Efisiensi APBN dan APBD untuk MBG. <https://www.metrotvnews.com/read/bD2CML14-prabowo-teken-inpres-efisiensi-apbn-dan-apbd-untuk-mbg>
- Metrotvnews.com. (2025). Program MBG Diyakini Bawa Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen. <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCVo09-program-mbg-diyakini-bawa-pertumbuhan-ekonomi-8-persen>
- Neraca.co.id. (2025). MBG Dinilai Ciptakan Pasar Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional. <https://www.newneraca.neraca.co.id/article/217776/mbg-dinilai-ciptakan-pasar-baru-untuk-pertumbuhan-ekonomi-nasional>
- Pardede, R., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2023). Faktor-faktor Keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 242-252. Retrieved from <https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/36>
- Paudpedia.kemdikbud.go.id. (2025). Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan Dimulai, Mendikdasmen dan Wamen Pantau Pelaksanaan. <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/kabar-paud/berita/program-makan-bergizi-gratis-di-satuan-pendidikan-dimulai-mendikdasmen-dan-wamen-pantau-pelaksanaan?do=MjIzMS1mYWZjMDk4OA&ix=MTETYmJkNjQ3YzA>
- Pitriyanti, S., Dawud, J., & Abdullah, S. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 3(1), 73-89. <https://doi.org/10.31113/jmat.v3i1.40>
- Presidenri.go.id. (2025). Presiden Prabowo Targetkan Seluruh Anak Dapat Akses Makan Bergizi Gratis pada Akhir 2025. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-targetkan-seluruh-anak-dapat-akses-makan-bergizi-gratis-pada-akhir-2025/>
- Ramdani, D.F., Abubakar, R.R.T., Dawud, J. (2021). Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3 (2), 263-269.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Rini, J.P., Sufianti, E., Abdullah, S. (2021). Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 227 - 231.

- Rizki, M., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2023). Meningkatkan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Negara (Literature Review). *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 208–219. Retrieved from <https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/33>
- RM.id. (2025). Meski Tekor 31 Triliun, APBN Sanggup Biayai Makan Bergizi Gratis. <https://rm.id/baca-berita/government-action/258407/meski-tekor-31-triliun-apbn-sanggup-biayaimakan-bergizi-gratis>
- RMOL.id. (2025, 20 April). Pakar Ingatkan Program MBG Jangan Bebani Keuangan Negara. <https://rmol.id/politik/read/2025/04/20/663674/pakar-ingatkan-program-mbg-jangan-bebani-keuangan-negara>
- Rosdiana, D., Karunia, R., & Sutrisno, E. (2024). Management of Operational Assistance Funds (BOS) in State Madrasah Tsanawiyah 15 Jakarta. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 773 -. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5058>
- Rosmalawati, R., Dawud, J., & Abdullah, S. (2024). EVALUASI KEBIJAKAN KERJA SAMA DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 5(1), 72–78. <https://doi.org/10.31113/jmat.v5i1.98>
- Santika, S., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 266–276. Retrieved from <https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/38>
- Suara.com. (2025, 22 Januari). Manuver Deddy Corbuzier Respon Kritik dan Keluhan MBG: Mengapa Justru Berbahaya bagi Prabowo. <https://liks.suara.com/read/2025/01/22/160901/manuver-deddy-corbuzier-respon-kritik-dan-keluhan-mbg-mengapa-justru-berbahaya-bagi-prabowo>
- Sudrajat, A. S., & Hanifah Rahayu, R. (2025). Implementasi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) di RSUD Kota Bandung. *Journal of Governance Innovation*, 7(1), 372–391. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.5256>
- Sufianti, E., Jubaedah, E., Abdullah, S. (2021). Building Sustainability of Public Service Innovation in Bandung City, West Java, Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, pp. 19 – 24. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.005>
- Susiawati, M., Nugraha, H., Priyantoro, A. (2025). Bureaucratic Simplification: Changes in Organizational Structure From Structural to Functional in the Central Java Provincial Government. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(1). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i1.16764>
- Taryono, O., Sufianti, E., & Jubaedah, E. (2025). How do Stakeholders Participate in Waste and Water Security Management? Insights from West Java Province, Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(1), 75–90. <https://doi.org/10.24258/jba.v21i1.1588>
- Taryono, O., Mursalim, S.W., Anwar, S. (2021). Strategy for Handling Covid-19 in the Perspectives of Policy Implementation, Community Institutions and Community Participation in Cileunyi Sub-District. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 140 – 145.
- Tempo.co. (2025). Prabowo Targetkan 6 Juta Anak Dapat Program Makan Bergizi Gratis Sampai April 2025. <https://www.tempo.co/politik/prabowo-targetkan-6-juta-anak-dapat-program-makan-bergizi-gratis-sampai-april-2025>

- program-makan-bergizi-gratis-sampai-april-2025-1197463
- Tempo.co. (2025). Penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis hingga Maret Baru 2,05 Juta Orang dari Target 82,9 Juta. <https://www.tempo.co/ekonomi/penerima-manfaat-makan-bergizi-gratis-hingga-maret-baru-2-05-juta-orang-dari-target-82-9-juta-1220375>
- Tempo.co. (2025). BGn Ubah Mekanisme Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis. <https://www.tempo.co/politik/bgn-ubah-mekanisme-pendanaan-program-makan-bergizi-gratis-1233926>
- Tempo.co. (2025). Mensesneg Sebut Inpres Efisiensi APBN untuk Tambah Anggaran MBG. <https://news.detik.com/berita/d-7746966/mensesneg-sebut-inpres-efisiensi-apbn-untuk-tambah-anggaran-mbg>
- Tempo.co. (2025). Program MBG Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Nasional. <https://wartaaalor.com/2025/02/27/program-mbg-stimulus-pertumbuhan-ekonomi-nasional/>
- The Conversation. (2025). Tipu daya populisme Prabowo: Memperkuat polarisasi menghilangkan oposisi. <https://theconversation.com/tipu-daya-populisme-prabowo-memperkuat-polarisasi-249746>
- Tribunnews.com. (2025, 18 Februari). Aksi Indonesia Gelap Kritik Program MBG: Siswa Bisa Makan Siang Gratis, tapi Keluarganya Kelaparan. <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/18/aksi-indonesia-gelap-kritik-program-mbg-siswa-bisa-makan-siang-gratis-tapi-keluarganya-kelaparan>
- Tribunnews.com. (2025). Program Makan Bergizi Gratis yang Digagas Presiden Dinilai Miliki Multiplier Effect Positif. <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/01/08/program-makan-bergizi-gratis-yang-digagas-presiden-dinilai-miliki-multiplier-effect-positif>
- UGM.ac.id. (2025). Ekonom Senior UGM: Program MBG dan Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Beban Rakyat. <https://ugm.ac.id/id/berita/ekonom-senior-ugm-program-mbg-dan-efisiensi-anggaran-jangan-sampai-beban-rakyat/unair.ac.id>
- Unair.ac.id. (2025). Menimbang Risiko Penggunaan Dana ZIS untuk Program MBG. <https://unair.ac.id/menimbang-risiko-penggunaan-dana-zis-untuk-program-mbg/>
- Universitas Medan Area. (2024). Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan untuk Mendorong Perekonomian. <https://p2dpt.uma.ac.id/2024/09/12/kebijakan-fiskal-yang-berkelanjutan-untuk-mendorong-perekonomian/>
- Wartaaalor.com. (2025, 27 Februari). Program MBG Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Nasional. <https://wartaaalor.com/2025/02/27/program-mbg-stimulus-pertumbuhan-ekonomi-nasional/>
- Widajanto, A., & Abdullah, S. (2024). Model Budaya Organisasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 4(2), 132–142. <https://doi.org/10.31113/jmat.v4i2.94>
- Yanuar Aditya, M. I., Listiani, T., & Abdullah, S. (2023). Implementasi Kebijakan Penilaian Kompetensi Pemeriksa di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. *JRPA - Journal of Regional Public Administration*, 8(2), 8–17. Retrieved from <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/1039>
- Yuliah, A., & Sudrajat, A. S. (2023). Dinamika Antara Proses Pembodohan, Demokrasi, dan Administrasi Publik (Perspektif Teori Administrasi Dalam Menghadapi Ancaman Terhadap Konsolidasi Demokrasi). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 148-154.